

POLICY BRIEF

Reformasi Data Produksi Kehutanan untuk Hilirisasi Berkelanjutan

Membangun tata kelola kehutanan berbasis data untuk mendukung hilirisasi, keberlanjutan, dan pengambilan keputusan

DITUJUKAN KEPADA

1. Kementerian Kehutanan RI
2. Kementerian Perindustrian RI
3. Badan Informasi Geospasial RI
4. Badan Pusat Statistik RI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kualitas data produksi kehutanan Indonesia belum mampu mendukung hilirisasi, perdagangan internasional, dan pelaporan pembangunan berkelanjutan. berisiko menghasilkan kebijakan yang kurang tepat sasaran. Sistem yang ada hanya menjawab "berapa volume diproduksi", bukan "berapa nilai tambah tercipta, di mana, dan seefisien apa". Persoalan ini mendesak: klaim ekspor rawan gagal uji telusur, dan target Net Zero Emission 2030 menuntut data andal sekarang. Rekomendasi yang ditawarkan: pendekatan statistik multisumber bertahap melalui empat pilar: (1) standarisasi metrik, (2) integrasi register administratif, (3) perluasan cakupan, serta (4) dimensi nilai & diseminasi granular dengan peta jalan tiga tahap 2026–2029.

Manfaat kebijakan:

Neraca kayu nasional yang kredibel untuk mendukung hilirisasi, ketertelusuran ekspor, dan pelaporan pembangunan berkelanjutan secara terukur.

DISUSUN OLEH

Alvian Rachmad EP

Peneliti Kebijakan Publik — Serangkaian for Research Popularization

PENDAHULUAN

61,90 juta m³

Produksi kayu bulat 2025

87,15%

Konsentrasi Sumatera dan Kalimantan

10,75 jt m³ / 50,10 jt ton

Produksi kayu olahan

43,26%

Pangsa akasia di luar klasifikasi resmi

TIGA AGENDA KEBIJAKAN YANG BERTUMPU PADA DATA

Keberlanjutan

Pelaporan SDG dan target Indonesia FOLU Net Sink 2030 (–140 juta ton CO₂e) mensyaratkan deret waktu data yang konsisten & terbanding antarwilayah (Križman & Tissot, 2022).

Akses Pasar

Ketertelusuran ekspor kini disyaratkan pasar internasional, menuntut basis data hingga unit produksi termasuk hutan rakyat & usaha kecil yang justru paling sulit didata (Maryudi, 2015).

Hilirisasi

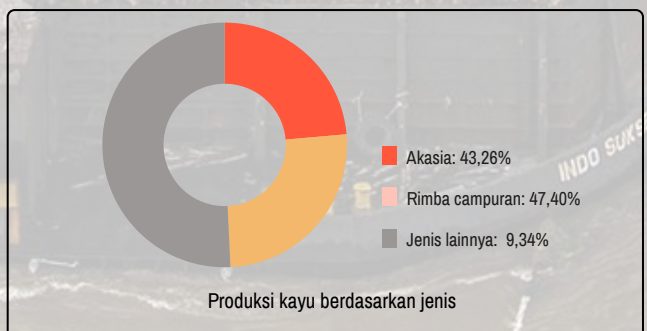
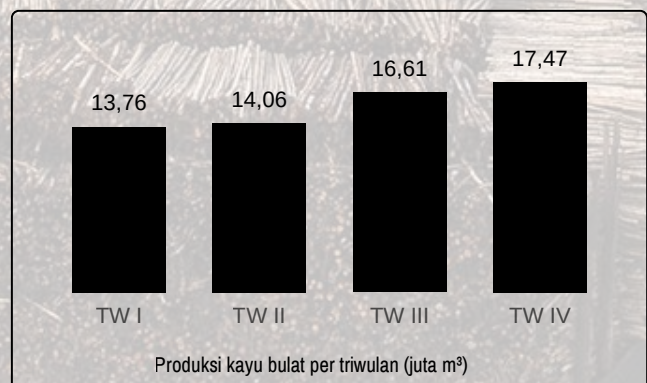
54,68% dari 125,54 juta ha kawasan hutan berstatus hutan produksi, menyumbang ekspor senilai US\$12,59 miliar pada 2024 (Kemenhut, 2024). Nilai tambahnya belum terukur karena faktor konversi & rendemen baku belum tersedia.

PERMASALAHAN

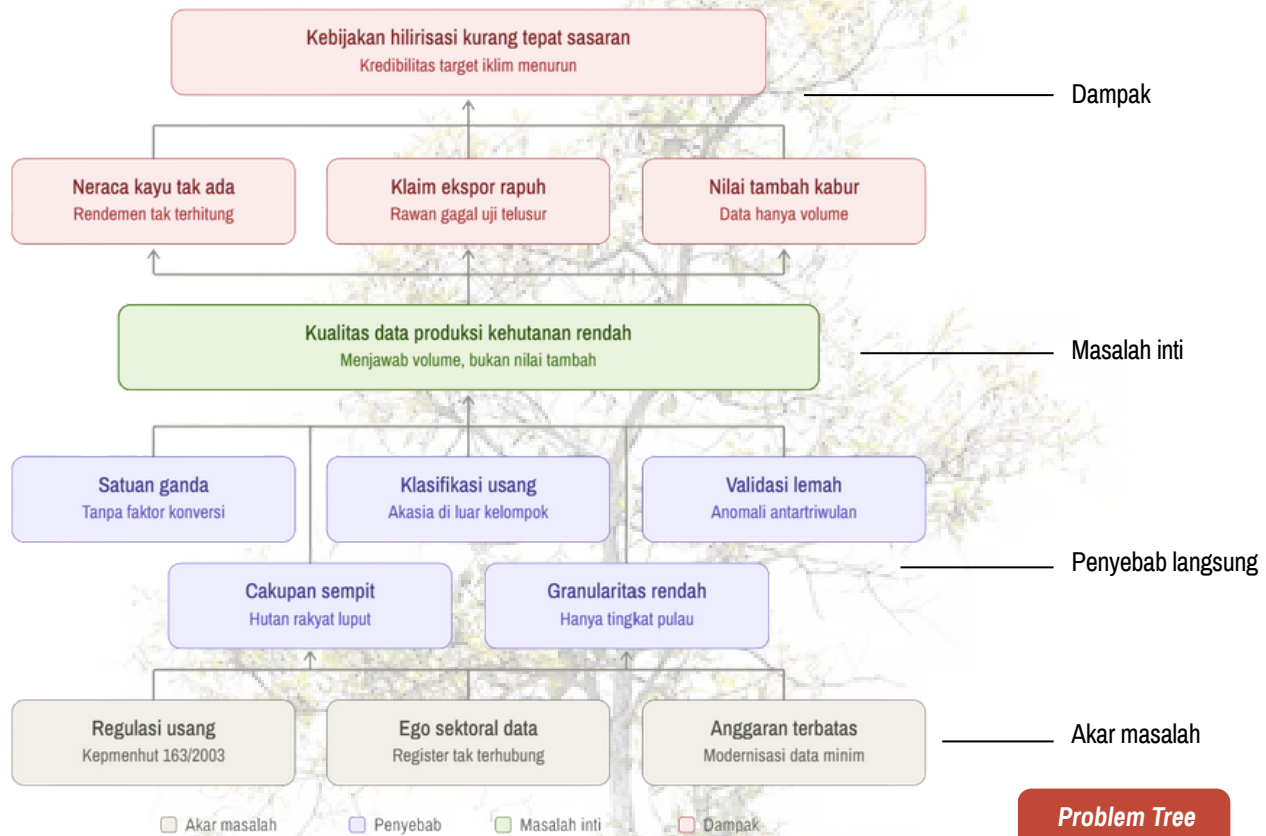
Sektor kehutanan Indonesia masih menghadapi tantangan pemerataan produksi. Akar kelima masalah berikut bersifat kelembagaan: regulasi klasifikasi belum diperbarui, interoperabilitas antarlembaga lemah, dan anggaran modernisasi data terbatas.

Struktur Produksi

INDIKATOR	NILAI 2025
Produksi kayu bulat	61,90 juta m ³
Produksi kayu olahan	10,75 jt m ³ & 50,10 jt ton
Konsentrasi 2 pulau teratas	87,15% (Sumatera 69,08%; Kalimantan 18,07%)
Pangsa akasia (kayu bulat)	43,26% (26,78 juta m ³)
Pangsa rimba campuran	47,40% (29,34 juta m ³)
Produksi terendah (Bali–Nusa Tenggara)	0,03% (19.457 m ³)



Sumber: Data Olahan, bersumber dari statistik Kemenhut, 2026



Lima isu berikut menjadi permasalahan yang perlu segera dibenahi:

- 1 Satuan ganda menghalangi agregasi**
Chip, pellet, rotan, gula aren, madu & buah dilaporkan dobel satuan tanpa faktor konversi kayu olahan tersaji sebagai dua angka (10,75 juta m³ & 50,10 juta ton) yang tidak dapat dijumlahkan, sehingga rendemen tak terhitung (Data Statistik Kemenhut, 2026).
- 2 Klasifikasi jenis kayu tertinggal**
Akasia menyumbang 43,26% produksi kayu bulat namun berada di luar 4 kelompok resmi (Kepmenhut No. 163/Kpts-II/2003); kelompok eboni yang resmi hanya tercatat 0,003% (Data BPS, 2025).
- 3 Cakupan bertumpu pada jalur administratif tunggal**
Produksi bambu Sumatera tercatat nihil; Bali–Nusa Tenggara hanya 0,03% dari total nasional bahwa indikasi hasil hutan bukan kayu & skala kecil tidak terekam (Data BPS, 2025).
- 4 Anomali antartriwulan belum terkelola**
Papan serat naik 6.116× dari TW I ke TW II; getah karet hutan 5,8×; rotan turun ke 0,04× tanpa mekanisme deteksi anomali yang sistematis (Data Statistik Kemenhut, 2026).
- 5 Tanpa dimensi nilai & granularitas wilayah**
Sumatera memasok 69,08% bahan baku namun nilai tambah tinggi terkonsentrasi di Jawa; data hanya tersaji hingga tingkat pulau, bukan provinsi (Data BPS, 2025)

ALTERNATIF & REKOMENDASI

Berbagai opsi kebijakan dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas tata kelola data kehutanan nasional. Setiap alternatif memiliki efektivitas, biaya, risiko, aktor pelaksana, dan kebutuhan regulasi yang berbeda-beda. Kebutuhan anggaran didanai kolaboratif APBN K/L terkait dan dipantau melalui dasbor kualitas data:

KRITERIA	A · INKREMENTAL	B · REGISTER PENUH	C · MULTISUMBER
Mengatasi masalah satuan	Sebagian ✗	Ya ✓	Ya ✓
Mengatasi masalah cakupan	Tidak ✗	Sebagian ✗	Ya ✓
Menghasilkan neraca kayu	Tidak ✗	Sebagian ✗	Ya ✓
Kebutuhan koordinasi antarlembaga	Rendah ✗	Tinggi ✓	Sedang–Tinggi ✓
Waktu & biaya	1 tahun biaya rendah	3–5 tahun · biaya tinggi	3–4 th (bertahap) · biaya menengah, progresif

Direkomendasikan Alternatif C

Hal ini karena cakupan perbaikan paling luas, risiko terkendali karena bertahap, biaya dapat dialokasikan progresif per pilar, dan dukungan lintas kementerian lebih mudah diperoleh secara bertahap

EMPAT PILAR PELAKSANAAN · 2026–2029

1 Standardisasi metrik & neraca kayu

- Faktor konversi resmi antarsatuan (2027)
- Faktor rendemen baku per produk olahan
- Neraca Kayu Nasional perdana (2029)

2 Integrasi register administratif

- Asesmen kualitas register (2027)
- Interoperabilitas data, uji coba 3 provinsi (2028)
- Kerangka rekonsiliasi antarsumber

3 Perluasan cakupan & dimensi

- Modul nilai & harga produsen
- Survei komplementer hutan rakyat & HHBK
- Pembaruan klasifikasi jenis kayu; validasi otomatis (2027)

4 Diseminasi granular & terbuka

- Rilis data tingkat provinsi (2027)
- Antarmuka data terbuka terbaca mesin
- Dasbor indikator kualitas data

2026–2027 · Konsistensi

Faktor konversi resmi, validasi otomatis, rilis provinsi

2027–2028 · Integrasi

Interoperabilitas register, modul nilai, data terbuka

2028–2029 · Kelengkapan

Neraca Kayu Nasional, survei komplementer, dasbor kualitas

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2026). Statistik produksi kehutanan 2025 (Vol. 14). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>
- FAO. (2023). The State of the World's Forests. Food and Agriculture Organization.
- OECD. (2022). Data Governance in the Public Sector. OECD Publishing.
- World Bank. (2021). Forest-Sector Statistics and Monitoring Systems. World Bank Group.
- CIFOR-ICRAF. (2024). Kajian tata kelola data hutan Indonesia.
- ITTO. (2023). Biennial Review and Assessment of the World Timber Situation.
- Križman, I., & Tissot, B. (2022). *Data governance frameworks for official statistics and the integration of alternative sources*. Statistical Journal of the IAOS, 38(3).
- Kementerian Kehutanan. (2026). *Forestix: Statistik Kehutanan Indonesia*. <https://statistik.kehutan.go.id/>
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan.
- Maryudi, A. (2015). *Choosing timber legality verification as a policy instrument to combat illegal logging in Indonesia*. Forest Policy and Economics.